

9-30-2016

Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013

Amri Mushlih
Lembaga Cemerlang Indonesia, amri.mushlih@gmail.com

Hurriyah Hurriyah
Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Comparative Politics Commons](#), [Other Political Science Commons](#), [Political Theory Commons](#), and the [Politics and Social Change Commons](#)

Recommended Citation

Mushlih, Amri and Hurriyah, Hurriyah (2016) "Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013," *Jurnal Politik*: Vol. 2: Iss. 1, Article 3.

DOI: 10.7454/jp.v2i1.1128

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol2/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Aktor Politik dan Gagalnya Transisi Demokrasi Mesir Tahun 2011-2013

AMRI MUSHLIH*

Lembaga Cemerlang Indonesia
Komplek Abadi Lt. 2, No. A6,
Jl. Gatot Subroto, Pasar Jambi, Kota Jambi, 36134
Indonesia

HURRIYAH**

Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia
FISIP Gedung B Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424
Indonesia
E-mail: amri.mushlih@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini membahas bagaimana peran aktor-aktor politik Mesir pada masa transisi yang menyebabkan kegagalan transisi demokrasi. Aktor-aktor tersebut di antaranya: 1) militer (SCAF (*Supreme Council of Armed Forces*)) yang mengambil alih kekuasaan sementara pada masa transisi; 2) kelompok Islam yang di dalamnya termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi; 3) elite rezim lama (*status quo*) yang merupakan elite sisa rezim Mubarak baik yang masih berada dalam struktur politik maupun yang telah tersingkir; dan 4) kelompok sekuler yang merupakan para elite dan aktivis masyarakat sipil yang muncul sejak revolusi anti-Mubarak terjadi. Interaksi aktor-aktor ini dianalisis dengan kerangka konsep transisi demokrasi dan teori elite dalam transisi yang dikemukakan oleh Higley dan Burton. Dari analisis tersebut, studi ini menemukan bahwa terjadi kegagalan *elite settlement* antara aktor-aktor politik Mesir akibat perbedaan ideologi dan gagalnya pengelolaan koalisi antara kelompok Islam dan kelompok sekuler. Selain itu, studi ini juga menemukan tidak terjadinya *elite convergence* karena para aktor memiliki komitmen yang rendah terhadap demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Kedua hal tersebut menyebabkan instabilitas politik yang berujung pada kudeta militer yang menandai gagalnya transisi demokrasi Mesir.

Kata kunci : Mesir, Timur Tengah, *Arab Spring*, Transisi Demokrasi, Aktor Politik dan Elite Politik

ABSTRACT

This study discusses the role of political actors in Egypt during the transition period leading to the failure of democratic transition in the country. These actors are: 1) the military, (SCAF (*Supreme Council of Armed Forces*)); 2) the Islamic groups, including the Muslim Brotherhood and *Salafi* groups; 3) the elites of the old regime (*status quo*), that are the remnants of the Mubarak regime either still in the political structure or been eliminated; and 4) the secular groups, including elites and civil society activists emerged since the anti-Mubarak revolution. The interaction of these actors was analyzed by applying the conceptual framework of democratic transition and elites in transition

*Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Lembaga Cemerlang Indonesia.

**Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

theory proposed by Higley and Burton. From the analysis, the study finds that the settlement among political actors in Egypt was absent as the result of differences in ideology and the failure of the coalition management between the Islamists and secular groups. Furthermore, the study also reveals the absence of elite convergence because the actors have low commitment to democracy as the only game in town. Both of these have caused political instability which ended with a military coup in 2013. The coup is a sign of the failure of Egypt's transition to democracy.

Keywords : Egypt, Middle East, Arab Spring, Democratic Transition, Political Actors and Political Elite

DOI: <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.81>

PENDAHULUAN

Tumbangnya sebuah rezim otoriter yang didorong oleh gerakan rakyat seharusnya menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk menjadi negara demokrasi. Begitu pula yang seharusnya terjadi di Mesir. Tumbangnya kekuasaan Husni Mubarak pada 11 Februari 2011 oleh kelompok pemuda merupakan sebuah kesempatan besar yang dimiliki Mesir untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Pasalnya, kelompok ini memang menuntut pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan berbicara dan berserikat, serta mengakhiri kekuasaan otoriter (Ottaway dan Ottaway 2015). Dengan kata lain gerakan kelompok ini menginginkan Mesir menjadi negara demokrasi setelah 30 tahun diperintah oleh rezim otoriter Mubarak.

Sayangnya, harapan untuk menjadi negara demokrasi tidak terwujud di Mesir. Pasalnya, aktor-aktor politik yang tampil pada masa transisi justru membuat demokrasi sulit untuk ditegakkan di negara *Fir'aun* tersebut. Aktor-aktor yang dimaksud di antaranya: militer, dalam hal ini SCAF (*Supreme Council of Armed Forces*) yang mengambil alih kekuasaan sementara pada masa transisi; kelompok Islam, yang di dalamnya termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi; elite rezim lama (*status quo*); elite rezim Mubarak baik yang masih berada dalam struktur politik maupun yang telah tersingkir; dan kelompok sekuler, yakni aktor-aktor politik sekuler yang berpengaruh sejak revolusi anti-Mubarak (Ozhan 2013, 13-24). Aktor-aktor politik tersebut telah menciptakan situasi yang buruk bagi transisi demokrasi Mesir. Situasi buruk yang dimaksud di antaranya dapat dilihat ketika pengambilalihan kekuasaan

an oleh SCAF pasca Mubarak, pemilihan umum yang menimbulkan polemik, dibubarkannya parlemen terpilih, konflik dalam penyusunan konstitusi baru, hingga kudeta militer 3 Juli 2013 terhadap pemerintahan Mursi yang sebelumnya terpilih dalam pemilihan umum.

Peran aktor-aktor politik merupakan salah satu studi penting dalam narasi studi-studi transisi demokrasi. Bersatu atau tidaknya elite yang dalam hal ini disebut aktor-aktor politik secara konsensual memiliki dampak terhadap berhasil atau gagalnya sebuah negara yang sedang berada dalam masa transisi untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi (Burton, Gunther, dan Highley dalam Highley dan Gunther 1992, 23). Senada dengan hal tersebut, studi ini ingin melihat bagaimana aktor-aktor politik yang disebut di atas dapat memengaruhi proses transisi demokrasi suatu negara dalam hal ini Mesir, yang dimulai dari jatuhnya rezim Mubarak hingga jatuhnya rezim Mursi. Rentang waktu tersebut merupakan momen paling menentukan dalam transisi demokrasi Mesir. Maka dari itu pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah *Bagaimana peran aktor politik dapat menyebabkan gagalnya transisi demokrasi di Mesir?*

STUDI LITERATUR

Menurut O'Donnell dan Schmitter (1993, 6), transisi merupakan “interval antara satu rezim politik dengan rezim setelahnya. Transisi sendiri memiliki batas, yaitu di satu sisi, dengan terjadinya pembubaran atas suatu rezim otoriter, dan di sisi lain, dengan berjalannya beberapa bentuk praktik demokrasi, kembalinya beberapa bentuk praktek otoritarianisme, atau kemunculan alternatif yang revolusioner”.

Masa transisi memiliki ciri-ciri yang sangat khas yaitu merupakan rentang waktu yang diisi dengan ketidakpastian (O'Donnell dan Schmitter 1993, 1). Tidak ada aturan baku yang dapat diikuti di dalam masa transisi. Sebagian bentuk aturan bahkan sistem politik tidak berlaku pada fase ini. Konstitusi dapat dibubarkan dan lembaga politik belum tentu dapat berjalan dengan efektif. Bahkan hasil dari masa transisi sangat tidak pasti yang dapat mengarah pada demokrasi atau dapat pula menjadi lebih buruk seperti perang sipil yang tidak pernah ada

akhirnya. Di sisi lain, ketidakpastian ini juga diisi dengan suatu aktivitas yang umumnya terjadi pada negara-negara yang mengalami transisi yaitu negosiasi antar elite. Elite-elite merebut momen kekosongan dan ketidakpastian untuk memengaruhi pembentukan aturan main yang baru demi kepentingan mereka. Negosiasi tersebut dapat berbentuk pakta kesepakatan baik formal maupun informal yang akhirnya menentukan hasil dari transisi itu sendiri (O'Donnell dan Schmitter 1993, 58). Akan tetapi, meskipun negosiasi terjadi, hal tersebut tidak menjamin akan tercapainya kesepakatan di antara elite.

Sementara itu, transisi demokrasi merupakan sebuah fase ketika kekuasaan otoriter berakhir dan digantikan oleh rezim demokrasi baru. Ciri yang melekat pada transisi demokrasi adalah hal tersebut merupakan suatu proses yang panjang dan pemerintahan baru yang demokratis bisa saja terbentuk. Akan tetapi, masih terdapat berbagai permasalahan terkait sisa rezim otoriter yang belum berubah sepenuhnya, sehingga dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konsolidasi demokrasi (Hurriyah 2009, 21).

Untuk mencapai sistem demokrasi yang relatif mapan atau disebut dengan demokratisasi suatu negara harus melewati beberapa fase. Setidaknya demokratisasi dapat terjadi dalam 3 fase yakni: *pertama*, fase persiapan ketika terjadi polarisasi aktor-aktor politik yang melemahkan rezim otoriter dan kemudian terjadi konflik yang menyebabkan rezim otoriter tersebut jatuh; *kedua*, fase memutuskan yang merupakan fase terjadinya kompromi dan negosiasi antar elite yang kemudian mengarah pada penetapan beberapa aturan-aturan baru yang disepakati; dan *ketiga*, fase pembiasaan (*habituation*) yaitu para aktor politik membiasakan diri dengan aturan demokrasi atau sering juga disebut sebagai fase konsolidasi (Hurriyah 2009, 352-361).

Transisi demokrasi dapat dikatakan berhasil ketika: *pertama*, telah terjadi kesepakatan mengenai prosedur-prosedur politik untuk menghasilkan suatu pemerintahan terpilih; *kedua*) pemerintahan tersebut berkuasa atas dasar legitimasi yang sah karena telah dipilih oleh mayoritas melalui pemilihan umum yang bebas; *ketiga*) pemerintahan tersebut secara *de facto* menghasilkan kebijakan-kebijakan baru; dan *keempat*)

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara *de jure* tidak harus berbagi kekuasaan dengan badan-badan lain. Keempat syarat tersebut harus terpenuhi sebagai standar berhasilnya sebuah transisi demokrasi (Linz dan Stepan 1996, 3). Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan hal mendasar yang mencakup demokrasi secara prosedural.

Penulis dalam hal ini berasumsi bahwa apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka transisi berarti tidak berhasil, dengan kata lain mengalami kegagalan. Asumsi tersebut didasarkan pada syarat demokratisasi menurut Huntington (1997, 45) yang mengatakan bahwa proses tersebut terjadi ketika rezim otoriter telah berakhir untuk dilanjutkan dengan dibangunnya rezim demokratis, dan kemudian rezim demokratis tersebut bergerak menuju konsolidasi demokrasi. Syarat keberhasilan transisi demokrasi yang dibuat Linz dan Stepan di atas berada pada tahap pembangunan rezim demokratis. Dengan kata lain, proses demokratisasi tak dapat bergerak menuju konsolidasi demokrasi apabila pemerintahan demokratis tidak berhasil dibentuk.

Pada masa transisi demokrasi paling tidak elite dan aktor politik dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu: *pertama*, konservatif garis keras; *kedua*) kelompok pembaharu (garis lunak); 3) oposisi garis lunak; dan 4) oposisi garis keras. Interaksi dari keempat aktor ini sering disebut sebagai *four player games* (Huntington 1997, 155). Elite dalam hal ini merupakan orang-orang yang memiliki posisi menentukan dalam suatu organisasi yang berkuasa, gerakan, atau lembaga lainnya yang dapat memengaruhi politik nasional secara reguler dan substansial (Higley dan Burton 1989, 18). Biasanya elite-elite tersebut didefinisikan sebagai pemegang posisi teratas dalam penguasaan sumber daya politik, pemerintahan, ekonomi, militer, profesional, komunikasi, organisasi budaya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa para elite menentukan arah masa depan politik dalam suatu transisi demokrasi.

Elite memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan stabil atau tidaknya suatu rezim. Dalam studinya, Higley dan Burton (1989, 20) mengatakan bahwa apabila elite nasional bersatu secara konsensual, maka suatu rezim akan mendapatkan kestabilan. Sebaliknya, apabila

elite nasional dalam suatu negara tidak bersatu maka rezim di negara tersebut pun akan mengalami ketidakstabilan. Dalam studinya itu, Higley dan Burton menjelaskan pula bahwa pada dasarnya kondisi elite tidaklah dalam kondisi bersatu. Namun kemudian, ketika negara tersebut mengalami perubahan, bersatunya elite akan menjadi penentu stabil atau tidaknya rezim baru yang terbentuk. Elite yang bersatu secara konsensual membentuk berbagai kesepakatan formal maupun informal yang berkaitan dengan aturan main dalam kekuasaan, sehingga dalam kondisi yang demikian rezim dapat berjalan dengan stabil.

Apabila dikaitkan dengan studi transisi demokrasi, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pada dasarnya elite nasional pada masa transisi berada pada kondisi tidak bersatu. Hal ini kemudian yang membuat masa transisi menjadi fase yang tidak stabil. Oleh karenanya, untuk mencapai suatu keberhasilan menuju demokrasi, elite dalam negara transisi harus bersatu secara konsensual dalam menyepakati aturan main yang akan mereka jalankan.

Untuk sampai kepada konsensus di antara elite tentang aturan main tersebut, terlebih dahulu terjadi sebuah proses yang disebut sebagai transformasi elite. Higley dan Burton menjelaskan bahwa terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam proses tersebut. Jalur pertama adalah "*elite settlement*" dan yang kedua adalah "*elite convergence*". Dalam konsep *elite settlement*, para elite yang sebelumnya bermusuhan dalam waktu yang cukup lama, dalam suatu kondisi tiba-tiba mereorganisir hubungan mereka dengan melakukan kompromi dan negosiasi (Higley dan Burton dalam Burton dan Ryu 1997, 5; lihat juga Admojo 2016). Sementara *elite convergence* merupakan sebuah proses yang berjalan dalam 2 (dua) tahap yaitu: *pertama*, faksi yang tidak loyal ataupun tidak terlalu loyal terhadap ideologi, merebut kekuasaan dengan cara berkoalisi untuk memenangkan pemilihan umum; *kedua*, faksi yang kalah kemudian terpaksa melakukan deradikalisasi ideologinya untuk mendapatkan dukungan pemilih moderat dalam pemilihan umum dan tetapi berposisi dengan yang berkuasa (Gunther dan Higley dalam Huang 1998, 18).

Dalam studi ini, teori tersebut dapat menjelaskan bagaimana interaksi aktor politik yang terjadi di Mesir kemudian menghasilkan sebuah kegagalan transisi demokrasi. Konflik antara kelompok Islam dan kelompok sekuler pada saat pemerintahan Mursi merupakan bentuk nyata dari apa yang disebut sebagai elite yang tidak bersatu (*disunited elite*). Dampaknya adalah sebuah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik dimaksud adalah ketika konflik elite tersebut menjalar ke level massa yang membuat masyarakat akhirnya terbelah antara pendukung Mursi dan anti-Mursi. Kedua kelompok ini kemudian menciptakan ketidakstabilan politik karena terlibat konflik kekerasan sehingga menghasilkan kekacauan. Dalam situasi kacau tersebut SCAF mengambil alih kekuasaan dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif menjadi pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Penelitian kualitatif memiliki ciri yang berbeda dan kegunaan yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti untuk mengukur sesuatu, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai upaya untuk memaknai data-data dalam proses pencarian kebenaran yang menggunakan logika induksi (Ritchie dan Lewis 2003, 26).

Menurut Ritchie, pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki empat fungsi yang digolongkan sebagai berikut: *pertama*, kontekstual, yang bertujuan untuk memaparkan sebuah fenomena yang terjadi; *kedua*, eksplanatori, yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menjelaskan hubungan-hubungan yang terjadi dalam sebuah fenomena; *ketiga*, evaluatif, yang menilai seberapa baik sesuatu dapat berjalan, *keempat*, generatif, yang menciptakan sesuatu yang baru untuk mengembangkan teori sosial yang telah ada (Ritchie dan Lewis 2003, 26). Studi ini sendiri memiliki fungsi eksplanatori karena menjelaskan hubungan antara peran aktor pada masa transisi sebagai penyebab gagalnya transisi demokrasi.

Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Berbagai data sekunder di antaranya: buku, jurnal, serta berita-berita dari internet akan dijadikan sebagai

sumber data penelitian ini. Tidak adanya akses terhadap data-data primer seperti penelitian lapangan ataupun wawancara mendalam terhadap aktor-aktor transisi Mesir menjadi kelemahan sekaligus keterbatasan dari penelitian ini.

KEGAGALAN TRANSISI DEMOKRASI DI MESIR

Gagalnya transisi demokrasi di Mesir disebabkan oleh tidak bersatunya aktor politik Mesir pada masa transisi. Hal ini diawali oleh gagalannya *elite settlement* ketika kesepakatan antar aktor politik tentang posisi kekuasaan maupun aturan main tidak dapat bertahan. Kegagalan yang dimaksud adalah tidak bertahannya kesepakatan antara kelompok Islam dan kelompok sekuler dalam mempertahankan pemerintahan sipil baru yang dipimpin oleh Mursi. Hal ini kemudian membuat kondisi Mesir menjadi tidak stabil. Munculnya konflik antara kelompok Islam dan kelompok sekuler akibat perbedaan ideologi di antara keduanya berujung pada kekacauan dan konflik fisik. Akibatnya, militer kemudian mengambil alih kekuasaan dengan cara kudeta terhadap pemerintahan Mursi.

Di sisi lain, bersatunya elite ataupun aktor politik melalui jalan *elite convergence* pun tak terjadi. Hal ini disebabkan karena aktor politik yang tidak berada di kekuasaan tidak mau menyelesaikan konfliknya dengan membangun koalisi dan menyelesaikannya dalam pemilihan umum. Hal ini memperlihatkan lemahnya komitmen para aktor tersebut terhadap demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Lemahnya komitmen terhadap demokrasi ini pula lah yang membuat perpecahan tak dapat diselesaikan. Sebagaimana telah dijelaskan, perpecahan tersebut pula yang menciptakan tidak stabilnya rezim pada masa transisi. Pada akhirnya kudeta militer menjadi penanda dari gagalannya transisi demokrasi di Mesir.

TRANSISI DEMOKRASI MESIR DI BAWAH KENDALI MILITER

Menurut O'Donnell dan Schmitter (1993, 6) "transisi merupakan interval antara satu rezim politik dengan rezim setelahnya. Interval tersebut

dibatasi di satu sisi, dengan terjadinya pembubaran atas suatu rezim otoriter, dan di sisi lain, dengan berjalannya beberapa bentuk praktek demokrasi, kembalinya beberapa bentuk praktek otoritarianisme, atau kemunculan alternatif yang revolusioner”. Artinya, masa transisi demokrasi dimulai ketika rezim otoriter jatuh dari kekuasaan dan berakhir saat rezim baru yang terpilih dan memerintah secara demokratis berhasil muncul dan bertahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Linz dan Stepan, untuk mencapai keberhasilan dalam transisi demokrasi harus menjadi “*the only game in town*” (satu-satunya aturan main di sebuah wilayah).

Transisi demokrasi Mesir dimulai ketika Mubarak turun dari jabatan sebagai presiden dan SCAF mengambil alih kekuasaan yang kemudian melaksanakan agenda-agenda transisi. Agenda-agenda yang dimaksud terdiri dari beberapa hal yakni pembuatan konstitusi baru dan pemilihan umum. SCAF sebagai pemimpin masa transisi telah melaksanakan keduanya. Namun demikian, pelaksanaan agenda transisi tersebut tak berhasil mengantarkan Mesir menjadi sebuah negara demokrasi.

Dalam melaksanakan perubahan konstitusi, SCAF membentuk sebuah komite khusus yang diberi mandat untuk menentukan proses penyusunan dan penerapan konstitusi baru; membuat mekanisme pemilu yang bebas dan adil; dan membatasi kekuasaan pemerintah yang telah mengganggu hak dan kebebasan rakyat (European Union 2015). Hasilnya komite ini berhasil memberikan beberapa perubahan mengenai terbukanya kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi presiden, membatasi masa jabatan presiden menjadi empat tahun untuk dua periode, memperkuat peran parlemen dalam situasi darurat, menegakkan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan kebebasan sipil, serta menetapkan mekanisme amandemen konstitusi (Stilt 2012, 5-10). Hasil keputusan ini kemudian disetujui oleh mayoritas rakyat Mesir melalui referendum. Akan tetapi, hasil referendum tersebut diganti oleh SCAF dengan mengeluarkan Deklarasi Konstitusional 30 Maret 2011 yang berisi 63 pasal sebagai konstitusi sementara tanpa proses referendum ulang. Ini menunjukkan bagaimana SCAF memimpin masa transisi dengan cara yang tidak demokratis. Pasalnya, meskipun

tak banyak perubahan dari hasil referendum sebelumnya, tetapi membatalkan hasil referendum tanpa referendum ulang adalah sikap yang tidak menghargai demokrasi. Akhirnya, hanya aturan main SCAF yang diikuti hingga pemilihan umum dilaksanakan.

Agenda kedua yakni pemilihan umum. Pemilu di Mesir dilaksanakan dua kali selama masa transisi. Kedua pemilu tersebut yakni pemilu parlemen yang dimulai pada November 2011 dan pemilu presiden yang dilaksanakan pada Mei – Juni 2012. Kedua pemilu di Mesir tersebut dijalankan dengan relatif demokratis. Posisi SCAF sebagai pemerintah transisi tidak memperlihatkan intervensi yang berarti pada proses pemilihan umum.

Dari hasil pemilihan umum parlemen, terlihat bahwa kelompok Islam secara umum yakni IM dan Salafi (Al Nour) mendominasi parlemen. Di *Majlis Ashaab* (Majelis Rendah Parlemen Mesir), Aliansi Demokratik untuk Mesir (*Democratic Alliance for Egypt*) yang dipimpin oleh partai FJP (*Freedom and Justice Party*, kelompok Ikhwanul Muslimin) memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Aliansi ini terdiri dari FJP (216 kursi), Karama (6 kursi), Al Hadara (2 kursi), dan Partai Buruh (1 kursi), dengan total 225 kursi (45,2%). Aliansi ini diikuti oleh blok Islamis yang dipimpin oleh partai *Al Nour* yang berbasis Salafi dengan perolehan kursi sebesar 125 kursi (25%). Blok ini terdiri dari *Al Nour Party* (109 kursi), Partai Pembangunan (13 Kursi) dan *Al Asala* (3 kursi). Blok lainnya adalah Blok Mesir (*Egyptian Bloc*) yang terdiri dari *Tagammu Party* (3 kursi), Partai Sosial Demokrat Mesir (16 kursi) dan Partai Kebebasan Mesir (15 kursi) dengan total perolehan 34 kursi (6.8 %). Selain unggul di *Majlis Ashaab*, Ikhwanul Muslimin dan Salafi juga mendominasi perolehan kursi di *Majlis Ashura* (Majelis Tinggi). Aliansi Demokratik untuk Mesir memenangkan 105 dari total 180 kursi yang diperebutkan melalui pemilihan umum. Blok Islamis mendapat 45 kursi dan yang lainnya tak lebih dari 14 kursi (Basyar 2015, 28).

Sementara itu, Pemilihan Umum Presiden dimenangkan oleh Muhammad Mursi yang telah mengalahkan 12 calon lainnya pada putaran pertama dan mengalahkan Ahmed Shafik (Perdana Menteri terakhir era Mubarak) pada putaran kedua. Pada pemilihan umum putaran ke-

dua, Mursi dan Shafik bersaing dengan ketat. Hal ini terlihat dengan perolehan suara yang tidak berbeda jauh. Mursi memperoleh 51,73% suara, sementara Shafik mendapat 48,27%.

Meskipun terpilihnya Mursi menjadi penanda akhir transisi di bawah kendali militer, akan tetapi periode ini sebenarnya menyimpan beragam persoalan yang ikut memperburuk situasi politik Mesir setelahnya. Permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan militer yang dimaksud salah satunya adalah pada saat pembentukan Majelis Konstituen oleh parlemen yang baru terpilih. Posisi mayoritas yang dimiliki oleh kelompok yang berideologi Islam membuat kelompok yang berideologi sekuler tidak bisa menerima kenyataan bahwa jumlah anggota Majelis Konstituen juga didominasi oleh kelompok berideologi Islam. Hal ini membuat pemilihan Majelis Konstituen dilaksanakan sebanyak dua kali karena adanya pengulangan demi menyelesaikan perselisihan. Meski demikian konflik antara kedua kelompok ini pun tetap berlanjut pada tahap pembuatan naskah konstitusi.

Persoalan lainnya yang terjadi pada masa kepemimpinan SCAF adalah dibubarkannya parlemen terpilih. Setelah berhasil terpilih melalui pemilihan umum dan selesai membentuk Majelis Konstituen, pada 14 Juni 2012 parlemen baru Mesir dibubarkan oleh SCC (*Supreme Constitutional Court*). Alasan SCC melakukan pembubaran tersebut adalah mekanisme pemilihan anggota parlemen yang dianggap menyalahi konstitusi sementara. Kesalahan tersebut berkaitan dengan pasal yang menyatakan bahwa siapapun berhak mengikuti pemilihan umum, sementara aturan pemilu tak memberi kesempatan calon independen untuk terpilih melalui daftar partai. Sebaliknya, calon dari partai dapat terpilih melalui jalur independen. Meskipun demikian, pembubaran ini lebih memiliki motif politik daripada hukum. Hal ini disebabkan karena keputusan SCC ini disambut oleh SCAF dengan mengeluarkan *addendum* Deklarasi Konstitusional 30 Maret 2011 pada 17 Juni 2012 yang berisi tentang 1) keistimewaan militer dalam hal pembahasan apapun yang berkaitan dengan militer; 2) kewenangan kepada badan di bawahnya sendiri untuk mengambil kekuasaan legislatif karena dibubarkannya *Majlis Ashaab* oleh SCC; 3) hak SCAF menunjuk 100

anggota Majelis Konstituen karena parlemen sebelumnya dianggap tidak mampu menyelesaikan berbagai persetujuan di internal parlemen dalam merumuskan hal tersebut; 4) kekuasaan SCAF bersama dengan partai-partai untuk merumuskan naskah konstitusi; dan 5) penyusunan ulang jadwal transisi termasuk pemilihan umum parlemen ulang (Carter Center 2012, 12). Hal ini memperlihatkan bagaimana militer ingin tetap memiliki pengaruh dalam politik Mesir meskipun presiden baru telah terpilih.

Menanggapi hal tersebut. Mursi yang masih berstatus calon presiden pada saat itu mencoba memperkokoh posisinya dengan mengadakan pertemuan di Hotel Fairmont tanggal 22 Juni 2012. Mursi bersama kelompok Ikhwanul Muslimin dan partainya *Freedom and Justice Party* menggalang dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka, tokoh partai politik dan tokoh gerakan kaum muda. Dukungan itu diminta oleh Mursi untuk menghadang Ahmed Shafik karena dianggap mewakili rezim lama serta mengatasi ancaman yang muncul dari militer. Dalam pertemuan itu pula terjadi kesepakatan untuk mendukung Mursi, tetapi dengan mengajukan 6 (enam) syarat (Mukhtar dan Sasnal 2013, 3), yaitu:

1. Membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional yang dikepalai oleh tokoh politik yang tidak memiliki latar belakang IM ataupun FJP;
2. Melibatkan tokoh-tokoh dari seluruh gerakan nasional dalam tim presiden;
3. Menolak *addendum* Deklarasi Konstitusional 17 Juni 2012;
4. Menolak pembubaran parlemen oleh SCC;
5. Menyeimbangkan jumlah perwakilan sekuler dan islamis dalam Majelis Konstituen; dan
6. Menjunjung transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat Mesir.

Kesepakatan tersebut disetujui oleh hampir seluruh elite politik non-militer dan elite politik sekuler yang ada di Mesir. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk membendung ancaman sisa-sisa rezim Mubarak yang dapat mengembalikan Mesir kepada otoritarianisme.

DINAMIKA TRANSISI DI BAWAH PEMERINTAHAN MURSI

Setelah resmi dilantik dan diambil sumpah pada 30 Juni 2012, langkah pertama yang diambil Mursi sebagai presiden adalah mengeluarkan dekrit untuk mengembalikan posisi *Majlis Ashaab* untuk dapat kembali bersidang. Selain itu, melalui dekrit tersebut Mursi juga mengatakan bahwa pemilihan umum akan diadakan dalam waktu 60 hari setelah konstitusi selesai dibuat oleh Majelis Konstituen yang telah terpilih sebelumnya. Namun, upaya ini dianggap tidak sah oleh SCC. Mahkamah Tinggi Konstitusi Mesir tersebut memperingatkan Mursi bahwa langkah yang diambilnya adalah tidak sah dan jika melawan akan dianggap sebuah tindakan pelanggaran hukum. SCAF kemudian juga menanggapi dekrit ini dengan mengadakan pertemuan darurat namun tidak ada keterangan apapun yang dibagikan ke publik terkait pertemuan tersebut (BBC 2012).

Meskipun status *Majlis Ashaab* masih diperdebatkan, Majelis Konstituen masih menjalankan fungsinya. Namun, masa kerja badan tersebut dibatasi oleh SCC dan akan berakhir pada 24 September 2012. Di lain pihak, SCAF menyatakan siap mengambil perannya sesuai dengan *addendum* 17 Juni bahwa mereka memiliki kewenangan untuk mengambil alih kekuasaan legislatif dan melakukan *veto* terhadap konstitusi apabila Majelis Konstituen tidak berjalan dengan benar (Watson 2012).

Posisi Mursi sebagai presiden sangat berat sebab harus berhadapan dengan SCAF dan juga SCC. Jika demikian, maka agenda untuk melangsungkan perubahan akan penuh dengan gangguan. Dengan latar belakang situasi itu, pada 12 Agustus 2012 Mursi mengeluarkan dekrit yang membatalkan *adendum* 17 Juni 2012 dan memberikan kewenangan penuh atas kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selain itu, apabila Majelis Konstituen tidak dapat menyelesaikan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan, maka presiden memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan yang dianggap perlu. Dalam dekrit tersebut, Mursi juga memensiunkan Jenderal Husein Tantawy dari jabatannya sebagai kepala SCAF dan menggantinya dengan El Sisi (Knell 2012). Namun demikian, Hussein Tantawy diberikan penghargaan tertinggi

negara atas jasa-jasanya. Langkah tersebut oleh sebagian pihak dianggap sebagai kudeta halus terhadap militer. Hal ini juga dianggap keputusan yang memberikan para jenderal tersebut jalan keluar yang aman. Hal ini dinilai tidak baik bagi kelompok pro hak asasi manusia sebab mereka menginginkan SCAF bertanggung jawab atas kekerasan yang fatal terhadap demonstran selama periode pemerintahan militer. Hal ini membuat agenda transisi yang akan dilancarkan oleh Mursi terkesan aman dari gangguan SCAF dan elite *status quo*.

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh Mursi justru datang dari koalisi yang dibangunnya sebelum dilantik sebagai presiden. Koalisi besar yang melibatkan hampir seluruh elemen oposisi tersebut terancam bubar akibat gesekan yang tidak kunjung berakhir dalam Majelis Konstituen. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perpecahan di antara kelompok oposisi Mubarak terjadi terkait dengan penyusunan konstitusi dalam isu penerapan syariat Islam. Kondisi *deadlock* yang terjadi dalam pembahasan konstitusi memicu aksi *walkout* dan boikot yang dilakukan kelompok sekuler. Hal ini membuat hubungan koalisi tersebut terpecah belah dan konstitusi terancam gagal dibuat. Kondisi pembahasan konstitusi yang tidak menemui titik terang tersebut ditanggapi oleh Mursi dengan dekrit presiden 22 November 2012 yang menyatakan bahwa:

1. Investigasi kasus pembunuhan dan aksi kekerasan terhadap demonstran akan dilaksanakan dan proses pengadilan akan dilakukan kembali;
2. Semua deklarasi konstitusional, aturan dan dekrit yang dikeluarkan oleh Mursi tidak dapat dibatalkan oleh siapapun termasuk individu, badan pemerintahan dan organisasi politik organisasi;
3. Presiden akan menunjuk jaksa penuntut umum baru yang akan ditugaskan oleh presiden untuk masa jabatan empat tahun dan berusia paling tidak 40 tahun;
4. Majelis Konstituen mendapatkan waktu tambahan 2 bulan untuk menyelesaikan naskah konstitusi;
5. Tidak ada otoritas yudikatif yang dapat membubarkan parlemen;

6. Presiden dapat mengambil tindakan apapun yang diperlukan untuk melindungi revolusi, melindungi persatuan nasional ataupun untuk melindungi ketertiban nasional (Ahram Online 2012a).

Yang ingin dilakukan oleh Mursi melalui dekrit tersebut adalah melindungi proses pembuatan konstitusi yang hampir kehabisan waktu (Kirkpatrick dan El Sheikh 2012). Dengan adanya dekrit ini presiden dapat memberikan waktu tambahan jika memang diperlukan. Alasan Mursi mengeluarkan dekrit tersebut diperkuat dengan adanya keinginan dari otoritas yudikatif yaitu SAC yang merencanakan untuk membubarkan Majelis Konstituen yang dianggap tidak dapat menyelesaikan perdebatan karena dominasi kelompok Islam yang terlalu kuat (Kirkpatrick dan El Sheikh 2012).

Selain itu, penentuan jaksa penuntut umum yang baru disebabkan oleh kegagalan jaksa Abdel Maguid Mahmoud yang menduduki jabatannya sejak era Mubarak dalam menangani kasus pembunuhan terhadap demonstran pada peristiwa "*Battle of Camel*".¹ Kegagalan tersebut membuat keadilan terhadap korban dianggap tidak terpenuhi sehingga Presiden Mursi memberhentikan Mahmoud dari jabatannya dan kemudian diberi jabatan sebagai duta besar Mesir untuk Vatikan. Meski demikian, Mahmoud tidak menerima penyingkiran dirinya (Kirkpatrick dan El Sheikh 2012).

Di sisi lain, meskipun Mursi berniat untuk memperpanjang waktu penyusunan konstitusi, namun kelompok sekuler justru menilai ini adalah sikap yang otoriter. Akibatnya pada 23 November 2012, terjadi protes besar di beberapa tempat di Mesir. Massa bahkan melakukan pembakaran terhadap kantor dan fasilitas IM dan FJP di daerah Suez, Ismailiah dan Port Said. Setidaknya terdapat 100 (seratus) orang korban menderita luka-luka akibat bentrokan yang terjadi antara penentang

¹ *Battle of Camel* merupakan peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang yang mengendarai unta dan kuda bersenjata tongkat yang menyerang dan memaksa demonstran untuk bubar dari Tahrir Square dan daerah lainnya dengan cara kekerasan. Hal ini terjadi pada Februari 2012 yang memakan korban meninggal sebanyak 11 orang dan sekitar 600 orang terluka. Para pengendara unta dan kuda tersebut diduga merupakan orang suruhan dari pemerintahan Mubarak. Selengkapnya lihat di Yasmine Fathi, "Egypt's 'Battle of The Camel' : The Day The Tide Turned", *Ahram Online*, (2 Februari 2011), diakses dari <http://english.ahram.org.eg/News/33470.aspx> diakses pada Kamis 12 November 2015.

Mursi dan kelompok IM (Batrawy dan Michael 2012). Menurut kelompok sekuler, dekrit yang dikeluarkan Mursi adalah upaya untuk menumpuk kekuasaan pada presiden sehingga tidak ada yang dapat menghalangi pembahasan konstitusi yang dilaksanakan di dalam Majelis yang didominasi kelompok Islam tersebut. Perpanjangan waktu tidak akan ada artinya selagi kelompok Islam masih mendominasi Majelis sehingga tujuan utama dari protes yang dilakukan kelompok sekuler adalah menuntut Mursi untuk segera membatalkan dekrit tersebut.

Aksi yang diawali pada tanggal 23 November tersebut kemudian berlanjut pada 27 November ketika puluhan ribu orang kembali menduduki Tahrir Square dengan membangun tenda-tenda (Gouda 2012). Namun demikian, keesokan harinya beberapa ribu orang mengadakan aksi di Alexandria untuk membela Mursi (CNN 2012). Kemunculan massa pembela Mursi menunjukkan bahwa konflik yang sebelumnya hanya sebatas perdebatan di Majelis Konstituen telah menjalar ke masyarakat dan membelah masyarakat Mesir. Pembelahan dalam masyarakat ini mengakibatkan kondisi kekacauan bahkan kerap terjadi kontak fisik di antara mereka.

Menanggapi kekacauan yang terjadi, Mursi mengundang para tokoh politik untuk melakukan dialog. Hasil dari dialog tersebut membuat Mursi bersepakat untuk mengubah isi dari dekrit 22 November. Mursi bersedia untuk menghilangkan poin tentang “kekuasaan presiden yang dapat melakukan tindakan apapun untuk melindungi revolusi”. Namun demikian, dekrit tersebut tetap menjamin bahwa *Majlis Ashura* dan Majelis Konstituen yang didominasi oleh kelompok Islam tidak dapat dibubarkan (El Sharnoubi 2013). Hal ini tidak membuahkan kesepakatan antara Mursi dan para tokoh kelompok sekuler sebab Majelis Konstituen dan konstitusi baru merupakan kepentingan utama mereka.

Di tengah ketegangan tersebut, Majelis Konstituen yang didominasi kelompok Islam menyelesaikan naskah konstitusi baru yang siap untuk direferendum. Menanggapi hal ini, gabungan oposisi terhadap Mursi yang bernama NSF (*National Salvation Front*) menolak konstitusi tersebut dan mengkampanyekan untuk memilih “tidak” dalam referendum konstitusi. Salah satu tokoh populer yang tergabung dalam NSF, Mo-

hamed el-Baradei, mengatakan bahwa konstitusi tersebut sama seperti sampah yang harus dibuang. Amr Moussa, mantan Sekretaris Umum Liga Arab yang juga merupakan anggota NSF mengatakan, “Dikeluarkannya konstitusi tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi dengan banyaknya protes yang diterima oleh Majelis Konstituen”. Khaled Dawoud selaku juru bicara NSF mempertegas penolakan tersebut melalui pernyataannya pada 12 Desember 2012 yang mengatakan, “Kami meminta semua warga memilih ‘tidak’ dalam referendum konstitusi”. Meskipun demikian, seruan-seruan tersebut tampak tidak memengaruhi hasil dari referendum karena konstitusi berhasil disetujui dan kemudian ditandatangani oleh Mursi pada 26 Desember 2012.

Setelah konstitusi baru disahkan, situasi justru semakin memburuk. Mursi masih terus dihujat atas konstitusi yang dianggap tidak sah tersebut. Kelompok anti-Mursi terus melakukan protes. Kondisi yang semakin kacau memunculkan satu gerakan yang lahir untuk melakukan protes terhadap pemerintah dan meminta Mursi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Gerakan tersebut bernama *Tamarrod* (berontak). Gerakan *Tamarrod* mengampanyekan kepada masyarakat Mesir untuk meminta Mursi mundur dari jabatan sebagai presiden dengan cara mengumpulkan 15 (lima belas) juta tanda tangan. Angka ini diambil karena kemenangan Mursi sebagai presiden hanya didukung oleh 13,2 juta pemilih sehingga dengan angka tersebut mayoritas rakyat yang meminta Mursi untuk turun lebih besar daripada pendukungnya. Hingga tanggal 29 Juni 2013, gerakan ini mengklaim telah mengumpulkan 22 (dua puluh dua) juta tanda tangan. Selain mengumpulkan tanda tangan, gerakan ini juga mengajak masyarakat Mesir untuk melakukan aksi demonstrasi di hari peringatan satu tahun pemerintahan Mursi pada tanggal 30 Juni 2013. Seruan aksi ini kemudian ditanggapi oleh IM yang melakukan aksi tandingan. Kelompok IM mengumpulkan massanya di wilayah Rabaa al Adawiya (Farooq 2013).

Pada 30 Juni 2013 protes tersebut benar-benar terjadi di hampir seluruh Kairo, bahkan menyebar di Iskandariah, El Mahalla dan kota-kota di sekitar Terusan Suez. Pihak militer mengklaim terdapat 14 juta orang dari 84 juta total penduduk Mesir yang berada di jalanan pada 30 Juni

2013 (Fayed dan Saleh 2013). Menanggapi kekacauan yang terjadi, El Sisi memutuskan bahwa Mursi harus mengundurkan diri dan seluruh kegiatan presiden diawasi oleh badan intelijen. Mursi kemudian mencoba melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan kelompok militer, namun usaha itu mengalami kegagalan. Militer malah mengeluarkan ultimatum terhadap presiden dan seluruh partai penguasa untuk turun dari jabatan dalam waktu 48 jam terhitung sejak 1 Juli 2013. IM mengatakan bahwa ini merupakan upaya kudeta, namun militer menolak pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa militer hanya menjalankan keinginan rakyat (Al Jazeera English 2013). Gerakan *Tamarrod* dan *National Salvation Front* sebagai oposisi Mursi pun menganggap bahwa hal ini bukanlah kudeta melainkan upaya militer untuk melindungi rakyat Mesir (Daily News Egypt 2013).

Pada 3 Juli 2013, El Sisi mengajak FJP, gerakan *Tamarrod*, Al Nour Party, Imam Besar Al Azhar, Pemimpin Ortodox Koptik, dan Muhammad El Baradei untuk melakukan pertemuan. Di waktu yang sama, kelompok pro Mursi menolak negosiasi dengan militer. Sementara tokoh-tokoh politik lainnya memenuhi permintaan tersebut. Pertemuan tersebut kemudian membahas tentang *roadmap* masa depan Mesir. Alhasil pukul 21.00 waktu setempat, El Sisi memberikan pidato langsung melalui televisi yang berisi tentang *roadmap* masa depan Mesir termasuk mengakomodasi tuntutan oposisi untuk menurunkan Mursi dari jabatan.

Kudeta yang mengakhiri pemerintahan Mursi menandai gagalnya transisi demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih pertama pada masa transisi dan pemerintahan Mursi pada awalnya muncul sebagai harapan baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situasi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung membaik. Perdebatan sengit justru terjadi dalam penyusunan konstitusi baru yang seharusnya menjadi arena bagi koalisi yang dibentuk oleh kelompok oposisi Mubarak untuk bernegosiasi. Kuatnya kepentingan masing-masing kelompok menyebabkan dialog antara masing-masing kelompok tidak pernah menemui kesepakatan. Salah satunya adalah kepentingan ideologis mengenai penerapan syariat Islam dalam negara

yang menjadi isu sentral dan menjadi penyebab utama perpecahan antar elite tersebut. Perdebatan yang tak kunjung usai ini menyebabkan situasi politik menjadi tidak stabil. Kerusuhan demi kerusuhan pun terjadi karena massa termobilisasi mengikuti pengelompokan elite sehingga militer memiliki ruang untuk kembali mengambil alih kekuasaan dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Dari serangkaian pembahasan di atas dapat dilihat bahwa interaksi aktor-aktor politik dalam masa transisi di Mesir memiliki pengaruh yang besar dalam menghantarkan Mesir menuju kegagalan. Sikap masing-masing aktor dalam masa transisi tidak menunjukkan dukungan mereka terhadap demokrasi. Hal yang menandai sikap aktor tersebut di antaranya: SCAF melanggar hasil amandemen konstitusi yang di-referendum, elite rezim lama memanfaatkan celah konstitusi untuk membubarkan *Majlis Ashaab*, Mursi menggunakan dekrit untuk melindungi penyusunan konstitusi oleh Majelis Konstituen yang didominasi oleh kelompok Islam, serta kelompok sekuler yang menggunakan aksi protes dan boikot untuk menolak konstitusi yang dibuat. Di level massa, aksi protes yang menanggapi dekrit Mursi berubah menjadi kerusuhan akibat bentrokan yang terjadi antara pengkritik Mursi dan pendukung Mursi. Hal tersebut memperlihatkan cara-cara yang digunakan masing-masing aktor untuk merespons tindakan masing-masing. Luputnya komitmen terhadap demokrasi menjadi ciri utama dari pola yang terjadi. Maka dari itu, kegagalan transisi demokrasi tampak jelas terjadi di Mesir pada masa pasca Mubarak.

GAGALNYA *ELITE SETTLEMENT* PADA MASA TRANSISI DI MESIR

Kompromi elite-elite politik dalam menyusun rencana-rencana mengenai penerapan demokrasi merupakan faktor yang paling menentukan hasil dari suatu transisi demokrasi. Kekuatan-kekuatan politik utama sudah seharusnya melakukan perundingan-perundingan baik secara terbuka maupun secara tersembunyi mengenai langkah yang diambil pada masa transisi. Tentu perundingan tersebut seharusnya terjadi pada pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap demokrasi. Arti pen-

ting dari negosiasi ini menurut Higley dan Burton (1989, 20) berkaitan tentang menciptakan suatu rezim yang stabil karena ketika elite dapat bersatu secara konsensual akan terjadi kestabilan rezim. Sebaliknya, jika tidak bersatu, maka suatu rezim menjadi tidak stabil. Hasil yang diharapkan merupakan bentuk kesepakatan mengenai aturan main baik secara formal dalam bentuk konstitusi atau kesepakatan-kesepakatan informal untuk menerapkan sistem demokrasi sebagai satu-satunya aturan main (*the only game in town*).

Dalam konteks transisi demokrasi Mesir, perpecahan yang terjadi antara kelompok Islam dan kelompok sekuler merupakan faktor yang paling menentukan kegagalan proses transisi. Hal ini disebabkan karena SCAF sebagai pihak yang sempat mengendalikan masa transisi hanya bisa disingkirkan apabila elite politik sipil yang muncul pasca pemilu dapat menjaga kesepakatannya untuk menciptakan kestabilan politik. Menurut Larry Diamond, lembaga militer tidak akan mengambil kekuasaan dari rezim sipil yang berhasil dan memiliki legitimasi. Mereka melakukan intervensi dalam politik ketika politisi sipil dan partai politik lemah dan terpecah (Diamond dan Plattner 2001).

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sempat terjadi pertemuan antara kelompok Islam dan kelompok sekuler di Hotel Fairmount yang menghasilkan kesepakatan untuk bersatu menghalau kekuatan sisa rezim lama. Pada saat itu, hampir seluruh elite politik oposisi Mubarak berkumpul dan bersepakat untuk mencegah kemenangan Ahmed Shafik. Momen ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya *elite settlement* pertama antara kelompok Islam dan kelompok sekuler.

Kesepakatan di antara elite oposisi Mubarak ini seharusnya dapat membuat kelompok tersebut menjadi semakin solid dan kuat. Akan tetapi, Mursi sebagai presiden terpilih tidak memanfaatkan hal tersebut dengan baik. Koalisi tersebut hancur karena perbedaan ideologis dalam perumusan konstitusi. Perbedaan ini muncul karena IM sebagai kelompok mayoritas dalam Majelis Konstituen dikenal sebagai kelompok yang menolak nilai-nilai Barat dan sekularisme. Sementara itu, kelompok Salafi dalam hal ini partai Al Nour jelas memiliki kepentingan untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam bernegara.

Dengan hadirnya kedua kelompok ini sebagai mayoritas, kelompok sekuler merasa tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan konstitusi baru sebagai konstitusi yang tidak dipengaruhi oleh agama khususnya Islam. Alhasil, Majelis Konstituen menjadi arena pertarungan antara kelompok tersebut dalam menentukan aturan dasar masyarakat Mesir dalam bernegara.

Terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan kelompok sekuler membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Kelompok Islam yang merasa mendapatkan kemenangan elektoral terlihat enggan bernegosiasi dengan kelompok sekuler dan mempertimbangkan kembali target politiknya. Kelompok sekuler pun kemudian melakukan segala cara (*walk out* dalam pembentukan Majelis Konstituen dan *walk out* dalam penyusunan naskah konstitusi baru) agar konstitusi baru Mesir tidak dipengaruhi kepentingan kelompok Islam. Sikap kedua kelompok tersebut mengakibatkan proses pembuatan konstitusi menjadi sulit. Perselisihan ini kemudian memburuk disusul sikap kelompok sekuler yang menjadi anti terhadap Mursi. Akibatnya, koalisi yang telah dibentuk pun terpecah belah dan menjadi lemah.

Selain itu, Mursi sebagai presiden terpilih yang seharusnya juga mewakili koalisi tersebut gagal mengelola koalisinya. Dalam kabinet yang dibentuk oleh Mursi, tidak satupun dari kelompok sekuler yang ikut terlibat dalam pemerintahan. Dari 35 pos kementerian, terdapat lima menteri dari partai FJP, satu menteri dari partai Al Nour, dan satu menteri dari partai Al Wasat, serta satu orang militer, sementara sisanya diisi oleh para teknokrat independen, termasuk Hisham Qandil, yang ditunjuk sebagai perdana menteri (Ahram Online 2012b). Hal ini membuat ikatan koalisi menjadi renggang. Dampaknya, loyalitas anggota koalisi terhadap Mursi dan FJP menjadi sangat rendah.

Terjadinya *deadlock* dan konflik mulai dari pembentukan Majelis Konstituen hingga pembahasan konstitusi sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya merupakan contoh nyata dari terpecahnya elite politik sipil yang berujung pada ketidakstabilan. Ditambah lagi, dekret 22 November 2012 membuat elite politik yang tergolong dalam kelompok sekuler semakin tidak memercayai Mursi karena dianggap

ingin menyelesaikan *deadlock* tersebut dengan cara intervensi. Hal ini merupakan titik krusial yang pada akhirnya membuat Mursi dan IM ditinggalkan oleh koalisi yang pernah dibangun sebelumnya. Ini juga menunjukkan sebuah fenomena kegagalan *elite settlement* yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu perbedaan ideologi dan strategi yang salah dalam mengelola konflik dalam koalisi elite.

Tak hanya antara kelompok Islam dan kelompok sekuler, pemerintahan Mursi dan militer pun pernah mengalami *settlement*. Hal ini terlihat ketika Mursi memberhentikan Tantawy dari jabatannya sebagai kepala SCAF dan memberinya penghargaan tertinggi dan digantikan oleh El Sisi. Hal tersebut sebenarnya merupakan pilihan yang tepat sebagai salah satu strategi Mursi untuk melindungi kepentingan sipil. Pengangkatan El Sisi dan pemberian penghargaan terhadap Tantawy adalah upaya untuk menerapkan semacam *win win solution* antara oposisi rezim otoriter dan sisa rezim Mubarak. Dampak yang diharapkan tentu sebuah kestabilan rezim baru yang lebih demokratis tanpa adanya gangguan dari militer.

Pertanyaan yang muncul kemudian, jika memang Mursi dan El Sisi telah mencapai kesepakatan, mengapa kudeta masih tetap terjadi. Jawaban dari pertanyaan ini menurut penulis adalah karena hancurnya koalisi oposisi Mubarak yang menyebabkan tidak stabilnya rezim sipil. Koalisi oposisi Mubarak seharusnya memiliki kedudukan yang kuat karena mereka yang telah menjatuhkan rezim Mubarak. Akan tetapi pecahnya koalisi ini ternyata memperburuk situasi yang berujung pada huru-hara massa yang menyuarakan tuntutan-tuntutan kepada Mursi hingga akhirnya meminta Mursi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Pada peristiwa huru-hara yang terjadi menjelang kudeta terhadap Mursi terjadi polarisasi massa antara anti-Mursi vs pro-Mursi. Polarisasi ini menyebabkan konflik massa yang memiliki potensi menuju perang sipil sebab kekerasan di antara kedua kelompok terjadi dan menelan korban jiwa. Hal tersebut membuat situasi politik Mesir menjadi tidak stabil.

Situasi yang demikian ini kemudian ditanggapi oleh militer sebagai situasi krisis keamanan. Dalam situasi ini, militer Mesir merasa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan apapun, termasuk melakukan kudeta. Pada masa awal konflik tepatnya pasca dekrit 22 November 2012, SCAF mencoba menengahi dengan mengadakan dialog. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya, SCAF yang dipimpin oleh El Sisi mengambil alih kekuasaan dengan kudeta atas nama rakyat Mesir.

GAGALNYA *ELITE CONVERGENCE*

PADA MASA TRANSISI DI MESIR

Tidak stabilnya rezim yang berujung pada gagalnya transisi demokrasi Mesir tidak hanya disebabkan oleh elite yang tidak bersatu secara konsensual dan bahkan terpecah. Rendahnya komitmen setiap aktor terhadap demokrasi juga menjadi penyebab utama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Higley dan Burton bahwa ketika elite-elite dan aktor-aktor politik tidak bersepakat secara langsung atau melakukan *settlement*, maka elite tersebut bisa saja mengalami konvergensi (*elite convergence*). *Elite convergence* memang sebuah proses panjang terbentuknya koalisi-koalisi di antara elite dan aktor-aktor politik untuk berkompetisi dalam merebut kekuasaan. Akan tetapi, persyaratan dari proses konvergensi ini adalah semua pihak harus mengakui dan tunduk pada norma demokrasi. Dalam hal ini, setiap elite harus percaya bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah melalui pemilihan umum.

Di Mesir, *elite convergence* tidak terjadi sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perilaku elite selama masa transisi yang tidak tunduk pada demokrasi. Ketika parlemen dibubarkan dan SCAF mengeluarkan dekrit untuk mengambil alih fungsi legislatif pada 17 Juni 2012, terlihat bahwa elite-elite lama mencoba menghalangi elite-elite baru dengan berbagai cara yang tidak demokratis. Ketika itu, elite-elite baru tersebut mulai mendapat tempat di kekuasaan. Dekrit yang merupakan sebuah keputusan yang bersifat memaksa merupakan wujud nyata dari rendahnya komitmen para elite lama dalam hal ini SCAF terhadap demokrasi. Selain itu, pembubaran terhadap parlemen dan

pengambilalihan kekuasaan legislatif yang terpilih dalam pemilihan umum secara sepihak dan juga merupakan pengingkaran terhadap demokrasi.

Rendahnya komitmen aktor politik Mesir terhadap demokrasi juga dapat terlihat ketika kelompok sekuler tidak mendapat mayoritas di Majelis Konstituen. Elite-elite yang tergolong sebagai kelompok sekuler tersebut memilih untuk keluar dari forum dan melakukan boikot terhadap Majelis Konstituen maupun konstitusi yang dihasilkannya (Egypt Independent 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa kelompok ini tidak menerima hasil pemilihan umum yang telah memilih kelompok Islam sebagai mayoritas. Ini juga menjadi satu bukti yang memperlihatkan bahwa kelompok ini tidak berkomitmen terhadap demokrasi, sebab mereka seharusnya menunggu pemilihan umum berikutnya dan memenangkan kompetisi untuk mewujudkan perubahan sesuai keinginan mereka.

Tidak terjadinya konvergensi tersebut juga mengakibatkan perpecahan elite dan berakhir dengan ketidakstabilan rezim. Ketika elite tidak mengakui mekanisme demokrasi, maka mereka merasa dapat melakukan apapun untuk memperjuangkan kepentingannya. Alhasil, tidak akan pernah ada solusi dan aturan main yang diakui semua pihak. Elite akan berada pada posisi terpecah belah. Dalam konteks Mesir, seperti yang telah dijelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh militer, elite sisa rezim Mubarak, dan kelompok sekuler mengakibatkan ketidakstabilan rezim. Kudeta militer akhirnya menjadi pilihan yang disetujui oleh semua pihak yang berposisi untuk mengakhiri pemerintahan Mursi bersama partainya, FJP dan basis sosialnya, IM. Dengan demikian, maka transisi demokrasi Mesir berakhir dengan kegagalan.

KESIMPULAN

Studi ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian bagaimana interaksi aktor-aktor politik menentukan proses transisi demokrasi yang kemudian berdampak pada kegagalan transisi demokrasi di Mesir. Dengan menggunakan konsep transisi demokrasi dan teori elite dalam transisi

yang dikemukakan oleh Higley dan Burton studi ini menemukan bahwa:

Pertama, transisi demokrasi Mesir mengalami kegagalan dengan mengacu pada teori Linz dan Stepan mengenai syarat sebuah transisi demokrasi dikatakan berhasil atau tidak. Mesir dalam hal ini berhasil melaksanakan pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan baru. Akan tetapi, pemerintahan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik akibat pembubaran parlemen oleh SCC dan tidak selesainya pembuatan konstitusi baru. Pemerintahan baru juga menghadapi konflik antar elite yang membuat militer melakukan kudeta pada 3 Juli 2013. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi penanda gagalannya transisi demokrasi Mesir.

Kedua, dalam transisi demokrasi Mesir, terdapat empat aktor yang berperan, yakni: SCAF (*Supreme Council of Armed Forces*); kelompok Islam, yang di dalamnya termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi; elite rezim lama (*status quo*), elite sisa rezim Mubarak baik yang masih berada dalam struktur politik maupun yang telah tersingkir; dan kelompok sekuler yang di dalamnya termasuk elite dan para aktivis anti-Mubarak.

Ketiga, interaksi antar aktor tersebut merupakan interaksi yang menunjukkan gagalannya *elite settlement* menyebabkan gagalannya transisi demokrasi Mesir. Kesepakatan baik mengenai peran di antara para aktor maupun aturan main demokrasi tidak terjadi. Hal ini menyebabkan aktor politik dalam hal ini para elite berada pada kondisi yang terpecah belah. Perpecahan di antara elite mengakibatkan instabilitas politik yang juga menyebabkan konflik di level massa. Hal ini menimbulkan keriuhan yang menyebabkan terjadinya krisis keamanan yang kemudian berakhir dengan kudeta militer yang menjadi penanda gagalannya transisi demokrasi.

Keempat, interaksi antar aktor politik pada masa transisi demokrasi di Mesir menunjukkan tidak terjadinya *elite convergence*. Hal tersebut mengakibatkan gagalannya transisi demokrasi Mesir. Tidak terjadinya *elite convergence* memiliki arti bahwa para elite tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi sebagai norma. Akibatnya, para elite dan aktor po-

litik dapat melakukan tindakan apapun untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Hasilnya rezim Mursi pada saat itu menjadi tidak stabil dan berakhir dengan kudeta militer. Dalam konteks *elite convergence* kudeta militer yang didukung oleh para aktor ini merupakan wujud nyata bahwa aktor dan elite politik yang tidak berkuasa mendukung cara-cara tidak demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Admojo, Tuswoyo. 2016. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014." *Jurnal Politik* 1 (No.2): 283-315.
- Ahram Online. 2012. "English Text of Morsi's Constitutional Declaration". 22 November. <http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx>. (12 November 2015).
- Ahram Online. 2012. "Meet Hisham Qandil's New Egypt Cabinet". 2 Agustus. <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/49365/Egypt/0/Meet-Hisham-Qandils-new-Egypt-cabinet.aspx>. (28 Februari 2016).
- Al Jazeera English. 2013. "Egypt's Morsi says he will not step down – Middle East". 14 August. <http://www.aljazeera.com/news/middle-east/2013/07/20137222343142718.html>. (12 November 2015).
- Basyar, M Hamdan. 2015. *Pertarungan dalam Berdemokrasi : Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. Jakarta : UI Press.
- Batrawy, Aya dan Maggie Michael. 2012. "Clashes Erupt Across Egypt Over Morsi's New Powers". *The Washington Times*. 23 November. <http://m.washingtontimes.com/news/2012/nov/22/presidents-backers-rivals-clash-egypt/?page=all>. (12 November 2015).
- BBC. 2012. "Egyptian President Mursi Reverses Paliament Dissolution". 8 Juli. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-18761403>. (12 November 2015).
- Burton, Michael G. dan Jai P Ryu. 1997. "South Korea's Elite Settlement and Democratic Consolidation". *Journal of Political and Military Sociology*. 25 (No. 1): 1-24.
- Carter Center. 2012. "Final Report of The Carter Center Mission to Witness the 2011-2012 Parliamentary Election In Egypt". <http://>

- www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-2011-2012-final-rpt.pdf. (4 Maret 2015).
- Carter Center. 2012. "Presidential Election in Egypt: Final Report May – June 2012". http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-final-presidential-elections-2012.pdf. (24 Februari 2015).
- CNN. 2012. "Egypt speeds new constitution amid Morsy protests". 28 November. http://edition.cnn.com/2012/11/28/world/meast/egypt-protests/index.html?hpt=wo_c2 (12 November 2015).
- Daily News Egypt. 2013. "National Salvation Front and Tamarrod call on Army to Intervene". 3 Juli. <http://www.dailynewsegypt.com/2013/07/03/national-salvation-front-and-tamrrod-call-on-army-to-intervene/>. (22 Juni 2016).
- Diamond, Larry dan Marc F Plattner (Eds.). 2001. *Hubungan Sipil Militer dan Konsolidasi Demokrasi* (terj. Tri Wibowo Santoso). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Democracy Reporting International. "Comprehensive Assessment of Egypt's Electoral Framework". European Union, http://www.democracy-reporting.org/files/egypt_electoral_framework.pdf. (1 Desember 2015).
- Egypt Independent. 2012. "Secular Figures Withdrawal from Constituent Assembly, Call Draft Egypt Downfall". 18 November. <http://www.egyptindependent.com/news/secularfigureswithdrawconstituentsassemblycalldraftegyptsdownfall>. (12 November 2015).
- El Sharnoubi, Osman. 2013. "Egypt's President Morsi in Power : A Timeline". *Ahram Online* http://www.jadaliyya.com/pages/index/13101/egyptspresidentmorsiinpower_atimeline. (12 November 2015).
- Farooq, Umar. 2013. "Seeking New Leadership, Millions of Egyptians Take to the Streets". *The Atlantic*. 30 Juni. <http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/06/seeking-new-leadership-millions-of-egyptians-take-to-the-streets/277419/>. (12 November 2015).
- Fayed, Shaimaa dan Yasmine Saleh. 2013. "Millions Flood Egypt's Street to Demand Mursi Quit". *Reuters*. 30 Juni. <http://www.reuters>.

- com/article/2013/06/30/usegyptprotestsidUSBRE95Q0NO2013063. (7 Maret 2015).
- Fathi, Yasmine. 2011. "Egypt's 'Battle of The Camel': The Day The Tide Turned", *Ahram Online*. 2 Februari. <http://english.ahram.org.eg/News/33470.aspx>. (12 November 2015).
- Gouda, Hazem. 2012. "Update: Protesters storm Alexandria Brotherhood office, set Mansoura FJP office on fire". *Almasry Alyoum*. 6 December. <http://www.egyptindependent.com/news/update-protesters-storm-alexandria-brotherhood-office-set-mansoura-fjp-office-fire>. (12 November 2015).
- Higley, John dan Michael G. Burton. 1989. "The Elite Variable in Democratic Transitions and Breakdown". *American Sociological Review*, 4 (No. 1): 17 – 32.
- Higley, John dan Richard Gunther (Eds.). 1992. *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huang, Tong-Yi. 1998. "Elite Transformation and Democratization in Taiwan". *Disertasi* University of Texas at Austin, dipublikasikan oleh UMI microform.
- Hurriyah. 2009. "Civil Society and Consolidation of Indonesian Democracy". *Tesis* International Master of ASEAN Atudies di University of Malaya.
- Huntington, Samuel P. 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (terj. Asril Marjohan). Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Kirkpatrick, David D dan Mayy El Sheikh. 2012. "Citing Deadlock, Egypt's Leader Seizes New Power and Plans Mubarak Retrial". *New York Times*. 22 November. http://www.nytimes.com/2012/11/23/world/middleeast/egyptspresidentmorsigiveshimselfnewpowers.html?_r=0. (12 November 2015).
- Knell, Yolande. 2012. "Morsi's Suprising Swipe at Military Power". *BBC*. 13 Agustus. <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19240200>. (12 November 2015).
- Linz, Juan J. dan Alfred Sefan. 1996. *Problems of Democratic Transition and Consolidation*. Baltimore : John Hopkins University Press.

- Mukhtar, Amal dan Patrycja Sasnal. 2013. "Democratic Opposition Alone Will Not Bring Democracy to Egypt". *Policy Paper*. 59 (No. 11): 1-5.
- O'Donnell, Guillermo dan Philippe Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian* (terj.). Jakarta : LP3ES.
- Ottaway, David dan Marina Ottaway. 2015. "Egypt's Leaderless Revolution". *The Cairo Review of Global Affairs*, <http://www.thecaireview.com/essays/egypts-leaderless-revolution/>. (22 Juni 2016).
- Ozhan, Taha. 2013. "New Egypt Versus Felool: Struggle for Democracy". *Insight Turkey*. 15 (No.1): 13-24.
- Ritchie, Jane dan Jane Lewis. 2003. *Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science*. London: Sage Pub.
- Stilt, Kristen A. 2012. "The End of "One Hand": The Egyptian Constitutional Declaration and the Rift between the "People" and the Supreme Council of the Armed Forces". Faculty Working Papers. Paper 208. <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/faculty-workingpapers/208>. (8 November 2015).
- Watson, Ivan. 2012. "Court Overrules Egypt 's President on Parliament". CNN. 11 Juli. http://edition.cnn.com/2012/07/10/world/meast/egypt-politics/index.html?hpt=iaf_c2 (15 November 2015).

